



Media: Joglo Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 11 April 2025

Halaman: 1

# Sultan Minta Segera Selesai

Pengusuran di Lempuyangan,  
Mangkubumi Undang Warga dan KAI

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menaruh perhatian terhadap permasalahan pengusuran 13 warga Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, yang tinggal di sisi selatan Stasiun Lempuyangan. Figur yang juga gubernur DIY

itu meminta permasalahan bisa segera selesai. Sultan akan mempelajari terlebih dahulu permasalahan di atas tanah Sultan Ground tersebut. "Coba kita nanti selesaikan. Bagaimanapun harus selesai itu kalau itu ada masalah," kata Sultan, saat diwawancarai wartawan di Kompleks Kepatihan

Kantor Gubernur DIY, Kamis (10/4/2025).

Sultan menegaskan, pihaknya harus mendengar terlebih dahulu permasalahan di Stasiun Lempuyangan. Nantinya, GKR Mangkubumi selaku Penghageng Tepas Panitikismo, lembaga pertanahan Keraton Yogyakarta yang akan mengundang kedua belah pihak. Yaitu, PT Kereta Api Indonesia dan warga. "Saya dengar kedua belah pi-

## Undang Bertemu

Sultan Hamengku Buwono X berusaha menyelesaikan pengusuran tempat tinggal warga di dekat Stasiun Lempuyangan.



Lokasi di Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta. Ada 13 warga yang rencananya digusur. Mereka sudah lama tinggal. GKR Mangkubumi selaku Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Yogyakarta akan mengundang warga dan PT KAI untuk bertemu.

hak. Yang mengundang biar lewat Mangkubumi," kata Sultan. Dia memastikan akan mengurai terlebih dahulu permasalahan tersebut. Dia pun tak bisa serta merta membuat keputusan. "Karena mungkin PT KAI punya hak. Tidak semudah itu (memutuskan)," jelasnya. Sultan pun menolak memberikan pernyataan mengenai masalah tersebut. Dirinya tak mau menimbulkan masalah baru.



Sultan HB X Gubernur DIY  
Baca SULTAN... Hal II

# Sultan Minta Segera Selesai

sambungan dari hal Joglo Jogja

Seperti telah diberitakan, warga di Tegal Lempuyangan, Bausasran, Kota Yogyakarta, memasang spanduk menolak pengusuran dari PT Kereta Api Indonesia. Perusahaan milik negara itu akan mengembangkan Stasiun Lempuyangan dengan memperluas sisi selatan.

Berdasarkan informasi dari warga terdampak pengusuran, nantinya Jalan Lempuyangan yang berada di sisi selatan stasiun akan dijadikan jalan khusus bagi penumpang.

Kemudian, bangunan rumah dinas di sisi selatan akan digunakan untuk perkantoran. Jalan umum akan dibuatkan baru di sisi selatan rumah dinas PT KAI.

Saat ini, rumah dinas PT KAI ini telah ditempati warga. Total ada 13 kepala keluarga (KK) yang menempati 13 bangunan

dengan rincian 11 di sisi selatan Jalan Lempuyangan menghadap ke utara dan dua ke Jalan Hayam Wuruk.

Ketua RW 01 Bausasran Anton Handriutomo mengungkapkan, rencana perluasan Stasiun Lempuyangan atau modernisasi itu disampaikan PT KAI saat sosialisasi 26 Maret silam di kantor Kelurahan Bausasran.

"Itu setelah kami meminta sosialisasi dilakukan di tempat netral," kata Anton, Rabu (9/4/2025).

Ia mengungkapkan, sebelumnya PT KAI secara mendadak memberikan undangan untuk sosialisasi pada tanggal 14 Maret. Tapi, memberikan undangan pada tanggal 13 Maret siang.

"Yang kedua, kita merasa terintimidasi, karena ngantar undangan kita-kok harus empat orang tiga staf, satu Polsus-

ka. Yang ketiga, kita keberatan kalau diadakan di PT KAI, kita minta diadakan di pihak netral, bisa di Kelurahan atau di Kecamatan," katanya.

Perwakilan warga A. Foki Ardiyanto menambahkan, 13 bangunan rumah dinas itu berdiri di atas tanah Sultan Ground. Saat ini, tempat itu telah berubah menjadi tempat usaha bagi puluhan masyarakat.

"Puluhan masyarakat selama ini mengais rezeki disana sebagai tukang parkir dan PKL menyatakan sikap menolak rencana modernisasi tersebut," katanya.

Mereka selama ini, lanjut Foki, telah mengantongi surat keterangan tanah (SKT) dari BPN sebagai bukti penguasaan fisik atas bangunan yang mereka tempati di atas tanah Sultan Ground. Mere-

ka juga sudah puluhan tahun tinggal di sana.

Itu sebagai bukti dari negara bahwa mereka yang selama ini merawat bangunan fisik tersebut dari rehab disaat terjadi gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 sampai ketika rusak karena puting beliung. Mereka juga membayar listrik serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Atas masalah itu, mereka sudah mengadu ke Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat *open house*, Rabu pagi lalu. Atas aduan itu, Hasto mengaku akan mempelajari terlebih dahulu.

"Saya jawab bahwa saya akan mempelajari alas haknya dan saya akan matur (sampaikan) dulu ke keraton. Nanti ada surat dan ada utusan dari kota untuk kita memohon apa arahan dari keraton terkait dengan alas hak tanah ini," ujarnya. (eri/ amd/st)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

